

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Beta Asteria

Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha,
e-mail: beta_asteria@stieww.ac.id

Abstract

This research deals with the impact of Local Tax and Retribution Receipt to Local Government Original Receipt of Regency/City in Central Java from 2008 to 2012. This research utilizes the data of actual of local government budget from Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan). Methods of collecting data through census. The number of Regency/City in Central Java are 35. But the data consists of 33 of Regency/City In Central Java from 2008 to 2012. Total of samples are 165. Karanganyar Regency and Sukoharjo Regency were not included as samples of this research because they didn't report the data of actual of local government budget to Directorate General of Fiscal Balance in 2009. The model used in this research is multiple regressions. The independent variables are Local Tax and Retribution Receipt, the dependent variable is Local Government Original Receipt. The research findings show that Local Tax and Retribution give the significant impact partially and simultaneously on Local Government Original Receipt at real level 5 percent. All independent variables explain 91,90 percent of the revenue variability while the rest 8,10 percent is explained by other variables.

Keywords: Local Tax, Retribution, and Local Government Original Receipt

PENDAHULUAN

Pemerintah sentralis yang dijalankan sebelum masa reformasi telah melahirkan berbagai masalah di daerah. Hasil dari sumber daya alam yang berlimbah di daerah banyak dialokasikan ke pusat tetapi sangat sedikit yang dialokasikan untuk daerah sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kurangnya pembangunan di daerah, kemiskinan dan konflik disintegrasi. Konflik tersebut menuntut lepasnya daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini, terjadi di beberapa daerah, seperti pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Konflik diintegrasi yang terjadi diakibatkan karena permasalahan ketidakadilan pusat terhadap daerah (Musliadi dan Halim, 2013).

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahmudi (2009:2). Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan reponsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efeasensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing (Rukmana, 2013).

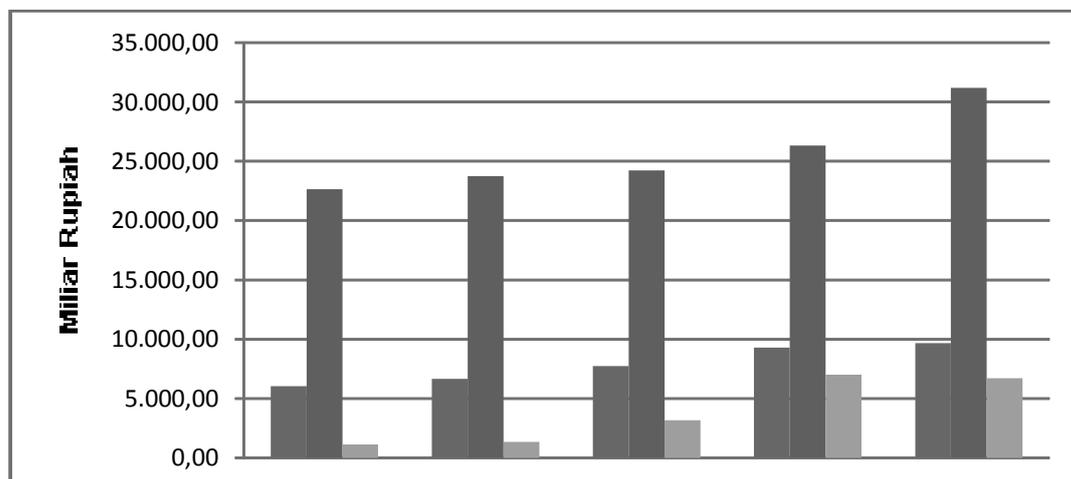
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota di Kota Semarang. Kabupaten di Jawa Tengah terdiri atas Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Kudus, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo,

Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal. Gambaran Umum Keuangan Jawa Tengah disajikan pada grafik 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah mengalami trend peningkatan dari tahun 2008 sampai 2012. PAD Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 6.055,34 Miliar Rupiah, PAD Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 6.662,34 Miliar Rupiah, PAD Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 7.743,30 Miliar Rupiah, PAD Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 9.292,60 dan PAD Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 9.659,02 Miliar Rupiah.

Menurut Mahmudi (2009:18), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD

Grafik.1. Komposisi Pendapatan APBD Prov. Jawa Tengah Agregat Prov.,Kab., dan Kota



	2008	2009	2010	2011	2012
PAD	6.055,34	6.662,34	7.743,30	9.292,60	9.659,02
Daper	22.636,99	23.755,14	24.235,62	26.311,61	31.180,41
L2PyS	1.130,62	1.340,17	3.182,86	7.001,01	6.702,59

(Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

PAD merupakan Tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli dan Retribusi Daerah merupakan peyumbang PAD terbesar kedua setelah pajak. Berbeda dengan Pajak Daerah yang berupa kontribusi wajib kepada daerah, retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karenanya, Retribusi Daerah merupakan sektor yang dapat digali dan diperluas pengelolaannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya, Kusuma dan Wirawati (2013), hasil penelitian dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD yakni sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%. Berbeda dengan hasil penelitian Murtadlo, diketahui bahwa pajak dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial, pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah, serta terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012.

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Pengertian Pajak menurut Soemitro (1998), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi

Menurut Siahaan (2005:7), beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut UU no. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pengklasifikasi Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Jasa Umum terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jasa Usaha terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Perizinan Tertentu, terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

- (1) Pajak daerah
- (2) Retribusi daerah
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dengan sensus. Menurut Sugiyono (2008:122), teknik sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota di Kota Semarang. Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo tidak melaporkan realisasi APBD pada tahun 2009. Tahun penelitian 2008-2012

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini data panel (*pooled data*) adalah gabungan antara *time series* dan *cross section* data (Gujarati, 2003). *Time series* sebanyak 5 tahun dan *cross section* sebanyak 33 Kabupaten/Kota. Jadi jumlah observasi sebanyak 165. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD Jawa Tengah, di dalamnya terdapat data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Definisi Operasional Variabel

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, "Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Penelitian Terdahulu

Penelitian Gita (2008), bertujuan untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan negatif terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah

2), pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif terhadap pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah. Sehingga dapat menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

Penelitian Wenny (2012), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), hasil penelitian dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%.

Penelitian Murtadlo, menunjukkan bahwa pajak dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial, pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.

Hipotesis Penelitian

H1 = Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

H3 = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah adalah regresi linear berganda. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PJK + \beta_2 RTB + e \dots\dots(1)$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PJK = Pajak Daerah

RTB = Retribusi Daerah

e = error

Uji Statistik

1) Uji t – statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam model terhadap variabel independen. Untuk itu keputusan signifikansi ditentukan dengan melihat probabilitas t-statistik hasil regresi berdasarkan tingkat signifikansi yang disyaratkan.

2) Uji F – statistik

Pengujian ini dilakukan pada model regresi berganda dimana terdiri lebih dari satu variabel bebas. Uji ini untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Uji koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Untuk mengetahui seberapa baik besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda tersebut dapat diterima secara ekonometrika, jika estimator memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimate

(BLUE) maka perlu pengujian asumsi klasik. BLUE adalah istilah dalam ekonometri yang mengacu pada kondisi ideal atau kondisi klasik yang harus dipenuhi untuk prosedur statistik regresi artinya kondisi BLUE merupakan asumsi yang harus dipenuhi dalam memberikan interpretasi terhadap hasil analisis regresi. Uji Asumsi Klasik terdiri atas:

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF diatas 10 menandakan adanya multikolinearitas.

Nilai Variance Inflation Tolerance (VIF) menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 108: 2013). Hasil olah data menunjukkan, VIF untuk variabel PJK sebesar 1.356 dan VIF untuk variabel RTB sebesar 1.356. Karena VIF untuk masing-masing variabel independen mempunyai nilai < 10 . Maka model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Kondisi autokorelasi bertitik tolak dari adanya gangguan-gangguan pada hubungan antar variabel. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Tabel 1. Kriteria Uji Autokorelasi

Daerah	Kesimpulan
$0 < d < d_L$	Autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Autokorelasi negatif

Sumber : Gujarati (2003:469-470)

Nilai DW sebesar 1,728 nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel sebanyak 165 (n) dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$), maka tabel Durbin Watson akan didapat nilai $d_l = 1,653$ dan $d_u = 1,693$. Oleh karena nilai $DW = 1,728$ lebih besar dari batas atas ($d_u = 1,693$) dan kurang dari $4 - 1,653 = 2,347$ maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak dapat menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 2. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.394	.000
LnPJK	1.547	.124
LnRTB	.415	.679

a. Dependent Variable: LnU2i

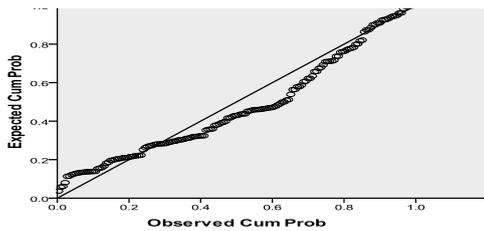
Menurut Suliyanto (2011), uji Park dilakukan dengan cara meregresi \ln kudrat unstandard residual ($U2t$) sebagai variabel dependen dan variabel independen X_1 dan X_2 . Hasilnya menunjukkan koefisien parameter beta dari persamaan tersebut tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Probabilitas signifikansi untuk PJK dan RTB yaitu 0,124 dan 0,679 yang mana signifikansi $t > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari heterokedastisitas.

4. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil olah data SPSS dihasilkan Normal P-P Plot Regression Standardized seperti terlihat pada gambar 1.

Uji normalitas dengan menggunakan P-P Plot of regression Standard Residual. Berdasarkan tampilan Normal P-P Plot Regression Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Oleh karena berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Gambar 1. Uji Normalitas



5. Linearitas

Pengujian linearitas dilakukan melalui *Durbin Watson Test*. Cara melakukan uji apakah sebaiknya model linear atau kuadrat, berdasarkan pada nilai DW tabel yang dibandingkan dengan nilai statistik. Jika signifikan atau berada pada daerah autokorelasi positif, maka spesifikasi model persamaan utama adalah salah, atau *misspecification*. Kriteria autokorelasi positif adalah $dW < dL$ (Ghozali, 166: 2013).

Pada persamaan regresi model pertama dengan $\alpha = 5\%$, jumlah pengamatan 165, dan jumlah variabel bebas 2, maka diperoleh dL sebesar 1,706 dan dU sebesar 1,760, sedangkan nilai DW sebesar 1,728. Karena nilai dW sebesar 1,728 lebih besar daripada nilai dL 1,706 maka model linear.

Persamaan Regresi Linear

$$PAD = 5,220E10 + 1,247 PJK + 0,283 RTB + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini ada tiga. Pengujian terhadap hipotesis pertama dan kedua untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t-statistik (Parsial) dan

pengujian hipotesis ketiga untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji F-statistik.

a. Uji t-statistik (Parsial)

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji t-statistik

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
PJK	1.247	33.850	.000
RTB	.283	2.285	.024

Sumber: data olahan

Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel 3. hasil Uji t-statistik, Pajak Daerah (PJK) mempunyai probabilitas t-statistik sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ artinya Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada taraf nyata $\alpha = 5$ persen.

Hipotesis Kedua

Berdasarkan Tabel 3. hasil Uji t-statistik, Retribusi Daerah (RTB) mempunyai probabilitas t-statistik sebesar $0,024 < \alpha = 0,05$ artinya Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada taraf nyata $\alpha = 5$ persen.

b. Uji F-statistik (Simultan)

Hipotesis Ketiga

Dari hasil regresi linear berganda diperoleh probabilitas F-statistik sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ berarti dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah (PJK) dan Retribusi Daerah (RTB) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Uji koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa baik besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Pada penelitian ini *adjusted R²* sebesar 0,919 yang artinya variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dijelaskan oleh Pajak daerah dan Retribusi Daerah 91,90 persen dan sisanya sebesar 8,10 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) serta penelitian Murtadlo, yang membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kabupaten/kota terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah merupakan penyumbangan terbesar sumber PAD. Oleh karenanya, Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut (Mahmudi, 2009).

Komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, distribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Semakin tinggi kemampuan

daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula sekresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan (Mahmudi, 2009). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013), yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda dengan hasil penelitian Murtadlo, yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada umumnya, Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut aras dasar balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas

pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat (Supardi, 2008).

Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Rukmana, 2013).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

Keterbatasan

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk dalam metode sensus pada penelitian adalah 33 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012. Hal ini, dikarenakan pada tahun 2009 Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo tidak melaporkan realisasi APBD kepada DJPK. Total

data sebanyak 165, sehingga hasil penelitian ini belum dapat mencerminkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia secara umum.

Saran

1. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebaiknya mengadakan sosialisasi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tentang pentingnya pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Hal ini dikarenakan, peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tercipta otonomi daerah.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melakukan evaluasi hasil sosialisasi kabupaten/kota di Jawa Tengah, mana yang sudah efektif dan belum efektif. Kemudian meningkatkan program sosialisasi bagi kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah yang masih belum efektif pemungutan pajaknya.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meningkatkan sarana dan prasarana yang dimilikinya, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Seperti Aparatur yang cekatan dan Komputer-komputer yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita, Dinata (2008), "Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Pad Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah", <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/658/415>.

- Gujarati, Damodar N. (2003), *Basic Econometrics*, 4thed, New York: Mc Graw Hill International.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati (2013), "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/7422/567>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2014).
- Mahmudi (2009), *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murtadlo, Kholid (2013), "Optimisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo", http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/02.-Kholid-Murtadlo_Lengkap.pdf. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2014).
- Musliadi dan Halim (2013), "Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012", *Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, Vol.21, No.21, Mei – Agustus.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rukmana, Wan Vidi (2013), "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau", Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDI-RUKMANA-090462201374-Akuntansi-2013.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 Juli 2014).
- Siahaan, Marihot P (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, H. Rochmat (1998), *Asas Perpajakan 2*, Bandung: PT. Eresco.
- Sugiyono (2008), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suliyanto (2011), *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- DJPK, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/257/11.%20JAWA%20TENGAH.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 Juli 2014).
- Wenny, Cherrya Dhia (2012). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan", Forum Bisnis Dan Kewirausahaan *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2 No. 1 September.